



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: HIMBARA
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 15 Januari 2019
Waktu	: 11.00 WIB s.d 12.37 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat	: Melchias Markus Mekeng
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono
Acara	: Proyeksi Perekonomian dan Perbankan Tahun 2019
Hadir	: PEMERINTAH: 1. MARYONO (DIRUT BTN) 2. ACHMAD BAIQUNI (DIRUT BNI) 3. SUPRAJARTO (DIRUT BRI) 4. KARTIKA WIRJOATMODJO (DIRUT MANDIRI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/F-PG):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Direktur Utama BTN Persero selaku Ketua Umum Himbara,
Yang terhormat saudara Direktur Utama Bank Mandiri beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Direktur Utama Bank Negara Indonesia Persero beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat, daftar hadir telah di tandatangani oleh 8 Anggota dari 7 Fraksi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI ijin kami membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Himbara. Dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Saudara Ketua Umum Himbara serta Direktur Utama Bank Mandiri, BRI, BTN dan BNI beserta jajarannya serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya kita bisa berkumpul pada Rapat Dengar Pendapat Umum pada pagi hari ini. Dan sebelum memulai Rapat Dengar Pendapat Umum ini kami dari Komisi XI DPR RI mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak dan Ibu sekalian, semoga di tahun 2019 ini kita semua bisa menjalankan tugas kita dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dalam melakukan aktifitas bisnisnya Bank BUMN sudah selayaknya menjadi ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini harus tercermin dari jumlah kredit yang diberikan kepada sektor riil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, dalam mencapai target penyaluran kredit tersebut Bank BUMN tetap harus berpegang kepada prinsip kehati-hatian agar NPL (*Non Performing Loan*) dapat terjaga dari waktu ke waktu.

Komisi XI DPR RI berharap agar Bank BUMN dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun 2019 ini. Bank BUMN juga diharapkan tetap memposisikan dirinya sebagai bank yang tetap fokus pada aktifitas bisnisnya dan juga tugas yang diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu sekarang jam 11.00 WIB tepat, saya persilakan kepada Ketua Himbara untuk memberikan penjelasan

tentang proyeksi perekonomian dan perbankan tahun 2019 dan lain-lain. Dan setelah itu akan ada tanya jawab.

Kami persilakan kepada saudara Ketua.

KETUA HIMBARA (MARYONO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati Ketua Pimpinan Rapat dan Pimpinan daripada Ketua Komisi XI DPR RI Bapak Melchias Markus Mekeng dan Bapak Soepriyatno,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Serta rekan-rekan dari Himbara.**

Perlu kami sampaikan mohon diijinkan kami ingin menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan perbankan, baik makro maupun mikro yang ada di Anggota daripada Himbara. Dan apabila nanti para Anggota DPR RI memerlukan tambahan penjelasan dan pertanyaan, nanti masing-masing Direktur Utama akan memberikan penjelasan yang lebih detail.

Kita mulai dari pertama Pak, karena sebelum kita membicarakan dari hal-hal yang sifatnya mikro kami mungkin menginformasikan kondisi ekonomi global bahwa di tahun 2018 bahwa pemulihan ekonomi global menunjukkan adanya masih adanya berhenti atau bertahan, karena hal ini kelihatannya bahwa resiko yang akan muncul yang diperkirakan di tahun 2019 kira-kira masih berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan. Meskipun saat ini diperkirakan kenaikan hanya 2 kali sepanjang tahun 2019.

Dan kemudian berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang dapat menimbulkan stagnasi pertumbuhan ekonomi global. Di samping itu juga harga komoditas global masih akan berfluktuasi dengan kecenderungan menurun yang tentunya akan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekspor Indonesia. Dan disisi lain terdapat kecenderungan kenaikan harga minyak dunia.

Faktor positif yang akan muncul di tahun 2019, potensi meredanya perang datang Amerika dan Cina dan kenaikan suku bunga acuan tidak seagresif yang diperkirakan sebelumnya, sehingga ini pengaruh daripada ekonomi global. Dengan adanya pengaruh global ini bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal ini Publik Indonesia juga telah memberikan satu respon antara lain adalah Pemerintah Republik Indonesia membuat penerapan paket kebijakan ke-15 dan 16 yang fokus kepada logistik dan peningkatan daya saing.

Kemudian juga mendorong iklim investasi melalui insentif pajak, yaitu perluasan cakupan industry yang memperoleh tax holiday dari 8 sektor menjadi 17 sektor. Kemudian juga menurunkan target defisit fiskal menjadi 1,84% yang semula adalah 2,19% pada tahun 2018. Dan kemudian direncanakan adanya implementasi perluasan penggunaan Bio Disel atau B-20.

Di samping itu regulator daripada Bank Indonesia juga menunjukkan adanya suatu antisipasi atau merespon daripada prognosa daripada kehidupan daripada ekonomi global. Misalnya adalah stabilisasi Rupiah melalui intervensi di pasar uang dan obligasi negara, pengenalan daripada DNDF (*Domestic Non Delivery Forward*) sebagai instrument hedging, ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor dan membuat rekening khusus dari hasil ekspor batu bara dan Pemberlakuan rasio intermediasi makroprudensial dan melonggarkan kebijakan GWM rata-rata dan pelonggaran LTV dan FTV.

Kemudian juga adanya suatu faktor domestic yang bisa mempengaruhi daripada ekonomi Indonesia. Yang antara lain faktor positifnya adalah tindak inflasi yang masih terkendali pada koridor BI 3,5 +-1%. Pengelolaan APBN yang kredible, efek positif kenaikan tarif impor dan kewajiban penggunaan bahan campuran biodiesel. Daya tahan perbankan yang masih kuat dan fokus kepada perbaikan kualitas aset, peningkatan pertumbuhan penduduk produktif, misalnya dalam milenial dan kebijakan tax holiday pada industry pioneer dan relaksasi DNI, penyelesaian pembangunan infrastruktur dan stabilnya konsumsi masyarakat di tengah perlehatan pemilihan Presiden dan Pileg.

Sedangkan faktor negative adalah berlanjutnya pertumbuhan impor yang dapat mendorong naiknya defisit transaksi berjalan, ketergantungan kepada investasi asing, baik investasi langsung maupun tidak langsung, dan adanya kecenderungan di tahun politik ini calon investor menunggu atau membuat satu strategi *wait and see*.

Permasalahan-permasalahan ekonomi Indonesia saat ini menurut kami adalah ada beberapa permasalahan yang structural, yaitu defisit neraca transaksi berjalan, ketergantungan ekspor komoditas, tersendatnya industrialisasi, defisit keseimbangan primer APBN.

Sedangkan faktor pendukung ekonomi Indonesia adalah stabilitas politik dan Pemerintahan yang bersih yang menciptakan iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat yang terjaga akibat stabilnya inflasi domestic, upaya memitigasi defisit neraca transaksi berjalan dan perbaikan sumber daya manusia, serta infrastruktur deregulasi yang terus dilanjutkan untuk mendorong proses indorisasi dan milenisasi, serta peran perbankan sebagai sumber pertumbuhan nasional.

Dengan adanya beberapa penilaian tadi, baik faktor pendukung nasional atau pengaruh adanya ekonomi global, maka sektor perbankan menunjukkan adanya satu konsolidasi yang terus berlanjut dan meningkatnya adanya pertumbuhan kredit. Secara nasional bahwa fungsi intermediasi perbankan semakin membaik, dengan pertumbuhan kredit yang meningkat dari 8,94% year on year di bulan April 2018 menjadi 13,4% di bulan Oktober.

Menghimpunan dana pihak ketiga perbankan juga mengalami penurunan pertumbuhan, yaitu dari 8,06% year on year di bulan April 2018 menjadi 7,6% year on year di bulan Oktober 2018. Sedangkan fokus perbaikan kualitas aset yang tercermin daripada ratio NPL yang terus menunjukkan tren yang semakin menurun, yaitu mencapai 2,65% di bulan Oktober 2018.

Konsolidasi perbankan secara nasional, namun konsolidasi yang dilakukan oleh Bank Himbara secara total menunjukkan masih lebih tinggi, lebih baik atau lebih

tinggi dibandingkan daripada pertumbuhan untuk perbaikan-perbaikan di sektor industri perbankan. Misalnya adalah pertumbuhan kredit di Mandiri, September 2018 menunjukkan peningkatan 13,8% dan pertumbuhan DPK meningkat 9,2% dan NPL-nya adalah 3,01% menurun. Sedangkan diproyeksikan di 2019 peningkatan kreditnya akan meningkat antara 12 sampai 13 dan DPK antara 11 dan 12 dan NPL-nya juga semakin menurun antara 2,6 sampai 2,65%.

BRI adalah pertumbuhan kreditnya meningkat 16,5% dan DPK-nya juga meningkat 13,3% dan NPL-nya menurun dari 2,5% dan di tahun 2019 NPL-nya semakin menurun diproyeksikan, yaitu 1,9% sampai 2,1% sedangkan kreditnya meningkat 12 sampai 14% dan pertumbuhan DPK-nya meningkat 11,13%.

BNI September adalah pertumbuhan kredit meningkat paling tinggi adalah 15,6% dan pertumbuhan DPK-nya 14,2% dan NPL-nya turun menjadi 2% dan diperkirakan tahun 2019 kreditnya meningkat 13 sampai 15 dan pertumbuhan DPK-nya 12 sampai 14 dan NPL-nya semakin menurun 1,9 sampai 2%. Sedangkan BTN-nya September juga menunjukkan pertumbuhan kredit 19,28% dan pertumbuhan DPK-nya 16,0% dan NPL-nya menurun menjadi 2,65% dan diperkirakan 2019 pertumbuhan kreditnya antara 12% sampai 15%, DPK-nya tumbuh sampai 12 sampai 15% dan NPL-nya semakin menurun 1,9 sampai 2,1%.

Di samping daripada peningkatan dari kinerja Bank Himbara tadi, walaupun dalam kondisi global, kondisi nasional, banyak faktor-faktor yang kurang mendukung, namun memberikan satu kinerja yang lebih baik dibandingkan industri perbankan secara nasional.

Di samping itu juga Himbara memberikan kontribusi kepada Pemerintah, yaitu baik dari sisi pajak maupun deviden. Di mana setoran pajaknya masing-masing Mandiri, BRI, BNI dan BTN, masing-masing 10,51%, 11,7% meningkat dari 2016 sampai 2017. Kemudian BRI juga meningkat dari 13,5 triliun menjadi 16,3 triliun. BNI juga meningkat dari 5,48 menjadi 6,9 triliun dan BTN dari 1,95 menjadi 2,47 triliun. Juga semakin meningkat, yaitu adalah Mandiri 3,73 triliun dan pada tahun 2017 menjadi 5,57 triliun. BRI 4,36 triliun dan BRI tahun 2017 menjadi 6 triliun. Sedangkan BNI juga meningkat, yaitu adalah dari 2016 1,37 triliun dan tahun 2017 2,38 triliun. Sedangkan BTN di tahun 2016 adalah 0,31 triliun dan tahun 2017 adalah 0,36 triliun. Itu adalah peran daripada Himbara terhadap sektor riil maupun kepada Pemerintah.

Sedangkan asumsi yang dipergunakan oleh perbankan dengan menggunakan proyeksi ekonomi 2019, yaitu akan menggunakan asumsi-asumsi, yaitu adalah asumsi makro dan asumsi mikro yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Saya kira ini tadi sudah dimasukkan di dalam proyeksi prognosa yang dibuat oleh masing-masing bank.

Kemudian kita sampaikan langsung bahwa kontribusi Himbara yang lain kepada program Pemerintah. Di samping tadi adalah angsuran pajak dan deviden, di mana adalah ada beberapa kontribusi Himbara, misalnya adalah penyaluran-penyaluran program kemitraan. 4 Bank Himbara pada tahun 2018 telah menyalurkan kurang lebih 418,3 miliar. Sedangkan penyaluran pada program bina lingkungan di tahun 2018 4 bank adalah sebesar 401,1 miliar. Sedangkan penyaluran kredit usaha rakyat kepada lebih dari 13 juta penduduk tahun 2018 ini adalah 3 bank, Mandiri, BNI

dan BRI yang sebagian besar adalah BRI itu adalah sebesar 248,9 triliun.

Sedangkan kontribusi yang lain adalah program keluarga harapan, ini adalah menyalurkan bantuan daripada keluarga harapan tahun 2018 melalui 4 Bank Himbara, yaitu 17,34 triliun. Sedangkan penyaluran bantuan pangan non tunai tahun 2018 4 bank sebesar 6,2 triliun. Dan pencapaian realisasi nasional program 1 juta rumah per November kurang lebih rata-rata kontribusi sebagian besar adalah BTN mencapai 1.041.323 unit.

Demikianlah presentasi beberapa laporan dan kinerja daripada bank Anggota Himbara. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, apabila ada pertanyaan atau tambahan penjelasan nanti masing-masing Direktur Utama masing-masing bank akan memberikan penjelasan yang lebih detail.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dari masing-masing Direksi tidak ada tambahan ya.
Kami persilkan Bapak Johnny G. Plate.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Baik, terima kasih.

Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati, Ketua Himbara, para Direktur Utama, para Direksi dan seluruh jajaran perbankan negara yang kami hormati.

Yang pertama tentu selamat tahun baru, walaupun sudah agak terlambat dengan harapan dan doa semoga industry keuangan kita di tahun 2019 berkembang mekar dan pesat, dinamis. Sama halnya seluruh keluarga besar Himbara akan mengisi tahun 2019 yang penuh dengan berkah yang berlimpah untuk bangsa dan negara.

Terima kasih atas presentasi hari ini, saya ada beberapa hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama, kami memberikan apresiasi atas kontribusi Himbara di dalam penerimaan negara. Ini kalau saya lihat datanya disini 2016, 2017 baik setoran pajaknya maupun deviden meningkat dari tahun 2016 ke 2017. Dan tentu kita harapkan prognosis untuk tahun 2018 juga setoran pajak dan devidennya juga meningkat, karena kita lihat di sini size perbankannya dari waktu ke waktu semakin besar.

Yang kedua, ini dia yang ingin kita mendapatkan konfirmasi sedikit. Dari informasi di dalam ruang publik yang menjadi perdebatan terkait dengan perusahaan-perusahaan milik negara, khususnya yang bergerak di sektor keuangan dalam hal ini perbankan. Di sampaikan bahwa perbankan negara di bawah Himbara mempunyai

utang pada kisaran 3.300 triliun, itu angka yang saya dapat. Dan diantaranya 74% adalah dana pihak ketiga atau 2.300 triliun lebih adalah dana pihak ketiga. Ini untuk edukasi publik kita inginkan Himbara memberikan penjelasan bahwa semakin besar dan besarnya porsi dana pihak ketiga yang ada di perbankan itu adalah bagian dari peran serta dan ikut sertanya masyarakat di dalam negeri di dalam mendukung sektor keuangan nasional kita. Apakah itu betul nanti tolong di konfirmasi.

Yang kedua, dengan beban 3.300 triliun industry perbankan kita khususnya Anggota Himbara, bahkan semakin mekar berkembang dan tidak goyah atau ditakuti akan koleps atau bankrupt. Ini informasi di ruang publik yang bisa membuat distorsi pemikiran masyarakat. Dan ini informasi-informasi seperti ini bisa ditafsirkan ganda dan ditafsirkan bermacam-macam yang menakut-nakuti pemilik. Nah, ini mohon dijelaskan agar jangan sampai distorsi-distorsi informasi seperti ini dilanjutkan di dalam ruang publik dan menjadi bagian dari strategi-strategi politik. Ya ini hal yang sangat teknis ini karena terkait dengan perekonomian rakyat. Kita minta untuk dijelaskan dengan baik agar masyarakat mendapatkan informasi yang betul.

Yang ketiga, disampaikan juga di sini bahwa ada 248,9 triliun KUR yang diberikan kepada 13 juta penduduk, itu disampaikan di sini. Kami juga minta penjelasan secara spasial per wilayah, karena KUR ini kita tahu konsep dasarnya untuk mendorong SMI, untuk mendorong rakyat-rakyat kecil untuk kegiatan produktif dan ekonominya bisa berkembang. Kalau bisa juga diberikan secara spasial yang provinsi mana dan sektor-sektor apa saja. Kami sebentar lagi akan melakukan Kunjungan Kerja ke beberapa wilayah, yang pasti hal-hal seperti ini akan menjadi pertanyaan masyarakat.

Yang ketiga Pak, tadi Ketua Himbara menyampaikan beberapa regulasi yang disampaikan atau yang disiapkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Bagaimana dengan regulasi-regulasi yang disiapkan oleh OJK, apakah membantu merangsang industry untuk merespon tantangan global. Dan hari ini atau malam nanti akan ada pemungutan suara di Parlemen Inggris terkait dengan Brexit. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi di ketahui bersama kemungkinan Perdana Menteri Inggris akan kalah votting. Nah, apa yang menjadi pertimbangan persiapan-persiapan Himbara dalam mengatasi atau mengantisipasi potensi distorsi industry keuangan Inggris. Bisa saja akan terjadi inflasi yang tinggi, bisa saja dana-dana pemilik-pemilik dana Inggris akan mencari tempat-tempat baru untuk ditempatkan dana-dananya. Dan apa persiapan kita karena kita juga membutuhkan banyak dana untuk memungkinkan iklim industry keuangan kita ini menjadi minat alternative mereka, alternative dari masyarakat Inggris.

Saya kira itu Pak Ketua, yang bisa kita tanyakan dan kami mendorong dan mendukung Himbara dan seluruh jajarannya. Semoga tahun 2019 tahun yang lebih menghasilkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebelah kiri ada?
Pak Refrizal silakan.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Bapak Ketua yang terhormat, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak-bapak perbankan yang tergabung di Himbara yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Selamat tahun baru, mudah-mudahan kita semangat baru semua untuk membangun bangsa dan pertumbuhan ekonomi anak bangsa kita.

Yang pertama, saya sependapat dengan Bapak Johnny Plate. Kita perlu Pak, performance setiap provinsi karena kami di DPR RI pasti punya Dapil. Saya pernah adakan acara Pak, dengan OJK Provinsi Sumatera Barat dengan masyarakat pelaku ekonomi kecil, UMKM. Langsung Bapak Darisman yang nanya kepada masyarakat, penerima KUR, "siapa yang sudah dapat KUR?" nunjuklah orang itu, "kami sudah Pak, dapat KUR", tapi tetap pakai jaminan. Tidak dapat kepala OJK Provinsi semuanya, kan miris kita itu. Kalau ini terjadi saya khawatir yang angka tadi besar, angka tadi besar dapatnya L3 atau L4 lo lagi lo lagi. Atau dia bikin, pernah ada penelitian dulu, dulu kami di Komisi VI DPR RI pernah Pak, kita minta data yang dapat itu apakah dana bergulir rupanya dia bikin perusahaan banyak Pak, alamatnya beda, ternyata dia-dia juga yang dapat.

Kita sudah capek-capek negara ini berkorban ngasih subsidi tapi yang dapat orangnya itu-itu saja. Bank senang berhubungan sama dia mungkin, karena apa? karena tidak menyulitkan dan mungkin bayarnya juga lancar, mungkin saya juga tidak tahu. Nah, ini kita khawatir kalau yang terjadi yang begini-begini. Bukan bank yang mensubsidi akan tetapi negara yang mensubsidi, kita menyetujui anggaran disini subsidi, kan sayang kalau tidak tepat sarannya.

Bapak boleh tanya nanti deh sama Bapak Dawisman Ketua OJK untuk acara dengan UMKM. Bukan saya yang ngomong, kalau kami yang ngomong setiap daerah pemilihan, pasti masyarakat mengeluh begitu. Mengeluhnya jaminan-jaminan lagi dan seterusnya dan sulit juga mendapatkan KUR itu. Nah, ini yang diperlukan oleh masyarakat.

Saya konsennya kepada masyarakat kalau 13 juta dapat Pak, ekonomi kita bergerak. Memang di lapangan memang kita pergi ke masyarakat, ke toko-toko, "tidak minta KUR?", "kalau kita minta KUR nanti bayarnya susah juga Pak, ini saya dari pagi tidak laris-laris, bagaimana nanti kami bayar". Barangkali bank lebih gampang kepada yang lancar, kalau yang begini-begini tidak ada pembinaan kepada mereka, tidak dapat KUR. Yang lancar mungkin dia bikin perusahaannya banyak, bisa dapat KUR itu ya.

Ini hanya kekhawatiran saya saja, mudah-mudahan tidak terjadilah. Tapi kalau yang tadi minta jaminan itu, itu yang bertanya bukan saya, langsung Kepala OJK Perwakilan Sumatera Barat. Kami ada acara dengan masyarakat, dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ada lagi?

Silakan Pak.

F-PPP (Dr. H. MZ. AMARUL TAMIM, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak-bapak dari dunia perbankan yang saya hormati.

Yang pertama, kami memberikan apresiasi dengan capaian-capaian kinerja tahun 2018. Yang ingin mungkin saya tanyakan, yang pertama tapi ini mungkin merupakan satu fenomena saja tapi mungkin bisa dicek. Ada peminat di daerah, beberapa calon-calon investor untuk mencari lahan. Katakan sebagai contoh untuk kelapa sawit, penanaman tebu dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah menyambut baik masyarakat dilibatkan dan lain sebagainya dan fenomena di daerah ini sudah berlangsung lama. Tetapi sampai dengan sekian tahun investasi tidak jalan dengan baik, sehingga ada praduga bahwa mungkin mencari alas untuk bisa mendapat dukungan dana, kemudian investasinya di tempat lain, tapi NPL-nya tentu pasti tidak terjadi. Ini mungkin perlu dicek, ini fenomena-fenomena yang kami lihat di daerah.

Sebenarnya menurut hemat kami juga melihat bahwa untuk melakukan investasi seperti katakan kelapa sawit, ini mungkin tidak terlalu efektif karena harus membuat pabrik dan lain sebagainya. Kemudian dukungan lahan juga, dari kuota juga mungkin bandingannya tidak terlalu ekonomis. Begitu juga isu-isu untuk pabrik gula, tebu, kebun tebu dan lain sebagainya juga menurut kacamata kita ini tidak ekonomis. Akan tetapi ini terjadi dugaan-dugaan seperti itu, tapi ini mungkin sebagai bahan informasi bisa dicek.

Yang kedua, ada program periode yang lalu, program PNPM yang dana bergulirnya itu ada di BRI. Persoalannya sekarang lembaga yang menangani terkait dengan dana yang bergulir itu secara kelembagaan itu sudah tidak ada, tapi secara administrasi orang-orangnya masih melaksanakan. Katakanlah seperti kami di Sulawesi Tenggara itu ada dana yang bergulir itu mungkin di BRI di UPK. Ini kami mohon untuk mungkin sebagai bahan. Secara nasional di Sulawesi Tenggara itu

sekitar 300 miliar yang lagi bergulir, kan lancar, NPL-nya juga cukup rendah. Tapi ini kelihatannya dari sisi Pemerintah sudah tidak ada punya kaitan untuk pertanyaan kita uangnya ini punya siapa ini yang ada di dana khususnya di UPK ini di BRI. Itu yang kedua.

Yang ketiga, terkait dengan kredit-kredit perumahan. Ada beberapa kasus yang kami temukan, 2017 uang muka sudah dibayar tetapi sampai sekarang yang sudah membayar uang muka itu belum mendapatkan rumah. Untuk itu, ada beberapa puluh orang yang sudah membayar sekian tahun tapi sampai sekarang belum juga dapat rumah di BTN. Nanti saya informasikan, hilang saya punya data. Nama developernya itu PT. Samara, kemudian Perumahan Serpong Green Paradise lokasi Parung Panjang, ini BTN. Jadi sebagai informasi ini ada sekian masyarakat ini bagaimana dengan program perumahan, karena ini tidak muncul di publik tapi bagi masyarakat-masyarakat yang sebenarnya harus mendapatkan hak perumahan bagi yang berpenghasilan rendah ini, ini kelihatannya masih ada diskriminasi.

Kemudian yang terakhir Pak, bagaimana pandangan dari Bapak-bapak di perbankan ini dengan gagasan untuk 0% DP kendaraan ini ya, digelontorkan oleh OJK ini. Sementara kalau kita lihat juga di daerah itu show room mobil bekas yang ditarik itu cukup banyak. Ini mohon tanggapan, respon.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi?

Silakan Prof.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

**Teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.
Bapak-bapak dari perbankan.**

Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, namun perlu kita sedikit *sharing*. Yang pertama, saya melihat tadi ada devidennya tidak sampai 1%. BTN di tahun 2016 dan 2017 devidennya kok tidak sampai 1%.

Yang berikutnya, menurut perbankan swasta serta proyek ekonomi di tahun 2019 itu sebaiknya menggunakan asumsi dasar optimismoderat atau pesimis dan ini terjadi bagaimana perbankan bisa memberikan solusi.

Yang ketiga, prioritas Pemerintah tahun 2019, Pemerintah akan melakukan restorasi dari infrastruktur dekonsentrasi pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana perbankan melihat ini.

Yang ketiga, Pemerintah menjelaskan bagaimana cara perbankan yang dipresentasikan ini Himbara sebagai Pemerintah yang masih, artinya Pemerintah saat ini masih massif melaksanakan infrastruktur dan banyak sekali mengalami permasalahan dalam mencari pembiayaan yang murah. Bagaimana Himbara bisa melihat ini.

Itu dari saya Pak, pertama tadi di slide yang keberapa tidak ada nomor, ini mengenai konsultasi Bank Himbara. Saya melihat Pak, walaupun itu labanya tidak mendekati keinginan atau maksimal, tapi perhitungan deviden dengan tidak mencapai 1% ini saya pertanyakan ini. Tahun 2016 0,31 dan tahun 2017 hanya bergeser kira-kira 5 point, terlalu rendah perhitungannya ini.

Itu Pak, tambahan dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

F-PKB (FAISOL RIZA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera.

Yang saya hormati Pimpinan dan para Direktur Utama yang tergabung dalam Himbara.

Selamat tahun baru sebelumnya.

Ada isu perbankan, saya kira bukan perbankan saja akan tetapi pembayaran terakhir terkait pembayaran secara online yang secara keseluruhan mungkin sekarang sedang menjadi isu agak penting. Beberapa minggu yang lalu di Bali, waktu itu Gubernur Bali yang terpilih agak serius menanggapi isu pembayaran online dari Cina melalui Chat. Yang kelihatannya itu sama sekali tidak terkoneksi dengan sistem pembayaran kita secara nasional, payment *gateway* kita, sehingga isunya menjadi isu politis seolah-olah ada satu intervensi industry keuangan Cina yang masuk ke dalam negeri kita. Padahal mereka membeli barang produk dalam negeri kemudian tokonya juga sebagian besar juga toko orang-orang kita juga, tapi proses pembayarannya itu melalui aplikasi we chat itu langsung dibayarkan ke industry keuangan di Cina.

Saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan terkait itu, karena kita melihat bahwa teknologi pembayaran secara online ini semakin lama semakin berkembang. Kalau dulu kita masih menggunakan kartu kredit untuk transaksi, sekarang sudah melalui electronic fund yang saya kira sekarang umum dipakai, bahkan bayar parkir saja sekarang banyak yang sudah tidak menggunakan cash. Bayar parkir di bandara, parkir di beberapa mall.

Nah, cuma salah satu isu yang sempat kita pertanyakan waktu itu ternyata beberapa produk electronic fund dari beberapa bank itu tidak *cross payment*, tidak *cross top up*. Jadi masing-masing bank hanya bisa men-top up kartunya sendiri. Nah, padahal kita menginginkan agar lebih mudah. Saya dengar sekarang sudah ada *cross* tapi mungkin perlu penjelasan lebih jauh.

Yang kedua, isu mengenai we chat inikan payment yang mempermudah kita tidak menggunakan kartu lagi, sehingga dengan barcode kita sudah bisa melakukan pembayaran terhadap satu transaksi. Nah, pertanyaannya adalah sejauhmana respon perbankan kita khususnya yang tergabung dalam Himbara ini menghadapi fenomena perkembangan teknologi yang saya kira tidak akan berhenti sampai hari ini, masih akan berkembang dengan teknologi baru. Kalau kita terlambat maka bukan tidak mungkin perkembangan teknologi industry ini menggerus sikap nasabah terhadap satu perbankan, sehingga dengan mudah untuk ikut proses aplikasi atau penawaran yang diberikan oleh pihak lain, sebagaimana contoh we chat tadi.

Saya kira itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Silakan.

F-PDIP (MANSIAMAN SARAGIH):

Terima kasih Bapak Ketua.

Teman-teman dari Komisi XI DPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat dari lembaga Himbara yang membawahi bank-bank Pemerintahan.

Saya ini dari Daerah Pemilihan banyak perkebunan rakyat, banyak juga perkebunan swasta dan Pemerintahan, yaitu di Riau. Di sana masih banyak rakyat itu tidak mempunyai akses keuangan ke perbankan, karena mungkin ketidaktahuan atau literasi keuangan itu belum sampai kepada mereka ataupun jaraknya memang jauh-jauh Pak, sehingga di perjalanan itu bisa 2-3 jam baru sampai ke Ibu Kota/Kabupaten baru ketemu. Banyak dari mereka itu terjerat dengan para rentenir yang begitu gampang memberikan persyaratan, tanpa persyaratan pun masih cepat dia berikan itu wajar. Tapi kalau dibiarkan seterusnya kan ini juga buat mereka menderita, karena

mereka itu hanya paling tinggi 4 hektar dia punya sawit, tapi rata-rata itu 1,5 sampai 2.

Jadi kalau sawitnya harganya bagus ya memang untuk kehidupan cukup ya cukuplah bagi mereka, tapi karena mereka tidak bisa menggunakan dananya itu dengan optimal sehingga habis-habis disitu juga diambil oleh para rentenir. Kita tidak heranlah sekarang ini banyak sekali pinjaman-pinjaman melalui online itu ya mungkin diajari oleh tetangganya dan lain sebagainya sehingga semakin terpuruk. Saya pikir itu perlu seperti BRI itu kan ada mobile banking yang keliling itu. Dia pergi ke pekan-pekan untuk memberikan pencerahan kepada rakyat dan juga sekaligus masyarakat itu juga merasa didatangi dan mereka merasa ringan untuk mendaftarkan akses ke perbankan. Di sana itu kalau dia pergi harus 3 jam perjalanan tanpa ada kendaraan ataupun naik kendaraan, ya itu keamanan dia membawa dana itu juga agak rawan. Jadi kalau setiap pasar itu disana masih dikenal itu pasar sekali seminggu datang mobile itu tadi, mereka akan berbondong-bondong kesana. Saya yakin itu dan mereka mampu sebenarnya, walaupun hanya bermodal sedikit hanya untuk kebun 2 hektar. Apalagi sekarang dana kelapa sawit yang dipungut sudah 3 tahun itu sekarang sudah bisa dicairkan. Cuma simpang siur informasinya Pak, kalau tetap dengan peraturan perbankan mereka tidak sanggup, karena kalau dia punya sertifikat biasanya sudah disekolahkan itu sertifikat. Kalau tidak paling tidak hanya surat keterangan Camat atau surat keterangan desa.

Itu yang ada yang bisa mencari jalan keluar ada yang tidak, sehingga tidak seragam. Ada satu contoh, turun tangan perbankan itu orang bank itu menjelaskan “anda boleh pinjam datang kemari untuk difoto copy sertifikatnya”, itu dibuat keterangan bahwa ini sesuai dengan asli. Itu saja sudah cukup, tapi ada juga dia tidak kasih keterangan seperti itu, jadi simpang siur Pak, yang mana yang mau diikuti. Jadi ada yang lebih menyederhanakan, karena itu katanya tidak masalah, karena dia kasih penjelasan bahwa itu sesuai asli, karena aslinya ada di pegang oleh bank. Jadi hal-hal seperti itu masih banyak.

Yang kedua Pak, bank-bank Himbara ini tolonglah ditingkatkan CSR-nya Pak, untuk meningkatkan usaha-usaha kecil yang ada berbasis. Tidak usah yang besar-besarnya yang berbasis wisata, berbudaya, lingkungan hidup, itu sangat membantu, contohnya di Sumatera itu, di Sumatera Utara terutama bagaimana turis itu bisa menikmati keindahan pemandangan itu kalau masalah toilet juga jadi masalah, kan gitu Pak. Apa salahnya kalau CSR itu juga diberikan dalam bentuk seperti itu, dimana sering mengumpul wisatawan ya dibangun sekalian memang dijelaskan disitu, bahwa ini adalah bantuan dari BNI atau Mandiri atau apalah.

Contohnya di Danau Toba itu, di Gunung Simarjanjung itu tempat orang swa foto Pak. Jadi dia datang hanya singgah untuk berfoto biar latar belakangnya danau, tapi persoalannya sekarang di sana tidak ada satu pun toilet yang memenuhi syarat untuk menampung ribuan orang setiap Sabtu dan Minggu, sehingga terburit-burit mereka kemana-mana hanya urusan itu, tidak jadi singgah, pergi dan sebagainya.

Nah, itu sebenarnya kesempatan dan mereka itu usaha sendiri Pak. Tanah yang dipinggir danau dia rapikan, dia buat panggung untuk foto-foto tapi dia tidak mampu untuk mendirikan toilet umum karena sumber airnya jauh di gunung harus

disalurkan dulu. Jadi kalau kita tanya kenapa air tidak ada? mobil yang bawa air belum datang, sementara sudah jam 11 siang kan, orang sudah butuh seperti itu. Hal kecil akan tetapi kalau rakyat diberikan bantuan seperti itu, memang bukan milik mereka itu CSR-nya Himbara tadi. Jadi saya rasa bagus sekali Pak.

Jadi itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

Ya, Ibu Tuti.

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi XI DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi XI DPR RI,

Yang saya hormati pula Pimpinan Himbara beserta seluruh para Direktur Bank Milik Negara yang tergabung di dalam Himbara.

Saya hanya ingin dua pertanyaan saja, dengan terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia ini, kira-kira peluang apa yang bisa diraih oleh Himbara terhadap kondisi ini, karena ini merupakan tantangan juga yang dihadapi oleh Himbara. Mengingat tadi saya sudah mendengarkan bahwa kinerja Himbara di tahun 2019 ini programnya sudah sangat baik dan saya lihat juga terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jadi tentu peluang-peluang ini sangat memungkinkan merupakan tantangan yang dihadapi Himbara.

Yang kedua, tadi mungkin menambahkan sedikit dari Bapak Faisol. Konsep sistem pembayaran menggunakan teknologi, yaitu *gio ar code* ini yang khusus untuk Himbara dibangunnya aplikasi yang terintegrasi. Nah, yang ingin saya tanyakan sejauhmana sudah implementasinya dilapangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

F- PKS (Ir. H. A. JUNAIIDI AULY, M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Bapak Junaidi silakan.

F- PKS (Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati,
Bapak-bapak dari Himbara yang kami hormati.**

Mungkin saya sedikit menambahkan saja ada sedikit temuan lapangan. Ada sahabat saya di Surabaya itu ditawarkan kredit modal kerja oleh Bank BNI. Ketika persyaratan-persyaratannya sudah dipenuhi dan sudah disampaikan dilengkapi, tetapi kemudian tidak ada tanggapan selanjutnya dari Bank BNI. Sampai berkali-kali beliau tanyakan juga tidak ada jawaban yang jelas, sampai dia tanyakan juga ke BNI Pusat. Dan dari BNI Pusat itu dia sempat *call* ke BNI Sidoarjo. Saya tidak tahu persis ini seperti apa, tapi cerita dia seperti itu. Kebetulan di load speaker dan jawaban dari Sidoarjo itu bukan groupnya di anu katanya. Jadi dalam tanda petik sampai hari ini tidak ada jawaban dan ada indikasi diskriminasi. Jadi saya kira ini mohon penjelasan saja dari pihak BNI terkait dengan masalah ini.

Demikian Ketua.

Terima kasih.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Ketua, satu lagi Ketua, belakang kiri.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak dan Ibu sekalian yang ada diruangan ini.

Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himbara. Dan kami sangat berharap kinerja terbaiknya untuk tahun 2019 nanti ini dari Himbara tolong ditingkatkan, dimaksimalkan, karena kondisi perekonomian yang semakin kadang-kadang tidak bisa diprediksi.

Nah, saya tidak bicara tentang terlalu muluk-muluk, tetapi saya ingin memberdayakan masyarakat ini untuk terlibat dalam mengikuti program-program di perbankan. Artinya, tentunya yang pertama adalah kredit dan menabung. Nah, ini menyebarluaskan masalah ini saya kebetulan Dapilnya Garut dengan Tasik. Nah, dari beberapa kali kita mengadakan kerja sama dengan Himbara salah satu yang sudah bekerja sama dengan saya itu adalah BRI, Mandiri, BTN, BNI juga tetapi masih sangat sulit untuk mengakses program itu. Padahal kami sebenarnya dengan niat baik sangat ingin membantu Himbara dalam mencapai kinerja yang terbaiknya.

Kalau boleh kami jelaskan di daerah pedalaman ini masih sangat minim ketertarikan maupun keinginan untuk menyimpan uangnya di Bank. Meskipun BRI sudah masuk ke pelosok-pelosok tetapi masih bisa dikatakan kalau di daerah kami di daerah saya Garut dan Tasik masih sama dengan Bapak yang di Riau. Di Riau itu sama jangkauannya sekitar 2-3 jam.

Nah, kalau boleh saya mengapresiasi ada satu bank di Jawa Barat ini yang perlu entah ditiru entah apa bahasanya. Yang jelas punya program yang bisa menjemput bola di masyarakat di pelosok. Mereka tidak perlu kantor besar seperti kantor-kantor BRI yang masuk ke pelosok-pelosok akan tetapi mereka punya agen-agen di warung-warung untuk tarik tunai, tabung dan lain sebagainya. Ada program namanya Laku Pandai, itu sangat luar biasa ketertarikan masyarakat dalam program itu.

Nah, Bank ini belum masuk Bank di Himbara kalau saya lihat disini belum masuk di Himbara. Tetapi sudah memiliki program yang sangat luar biasa dan menarik untuk masyarakat. Nah, kenapa tidak dengan Himbara, apa kesulitannya. Nah, itu yang pertama tolong diperhatikan itu, karena masyarakat kecil ini juga punya peran untuk bisa membantu perekonomian ini meningkat di negara kita ini. Itu yang pertama,

Kemudian yang kedua, setelah saya sering keliling di Dapil. Ini saya menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dan bahkan mungkin bisa dikatakan beberapa itu mengatakan enggan mengakses program KUR, karena berbagai macam kesulitan yang katanya mereka hadapi saat ingin mengakses program KUR. Padahal KUR ini seharusnya bisa hadir di masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian bahkan mungkin UMKM ini bisa ditingkatkan, sehingga nanti baliknya kemana lagi, ya ke Himbara lagi, ke perekonomian kita lagi kalau semakin semarak masyarakat untuk mengikuti program KUR ini.

Jadi saya himbau kepada Himbara, saya sarankan agar memperkuat sosialisasi tentang KUR. Itu diperkuat, karena memang yang sekarang ada akan tetapi saya terus terang pribadi karena berada di Komisi XI DPR RI belum pernah melihat dan terlibat bersama-sama dengan Himbara untuk mensosialisasikan KUR ini. Kalau di daerah Garut dengan Tasik jangan ditanya banyak sekali disana UMKM dan produk-produk unggulan yang bisa dikembangkan sehingga bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kinerja itu. Dampaknya kesana semua, yang saya pikirkan dampaknya kesana semua. Artinya, mari kita sama-sama saya akan membantu dan rekan-rekan di Komisi XI DPR RI saya yakin akan membantu semaksimal mungkin Himbara memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat melalui KUR ini. Siapa yang merasakan dan kembalinya kemana ya ke Himbara juga

nantinya. Itu yang kedua.

Kemudian yang terakhir, saya stressing disini mengingat apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain itu berakitan dengan CSR. CSR ini dari bank masih sangat sedikit kalau saya lihat. Saya terus terang, saya menghadapi berbagai macam masalah di masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini agak kesulitan untuk membantu dan sudah banyak yang sudah diajukan kepada Himbara. Anggota Himbara ini tetapi dari 100% itu sekitar kurang dari 10% terealisasi. Padahal di daerah yang Dapil saya itu termasuk daerah yang rawan bencana. Nah, ini tolong Bapak dan Ibu yang berada di Himbara perhatikan daerah-daerah tertentu, baik itu wisata di daerah kami juga ada wisata, tetapi karena berbarengan dengan adanya bencana ini masih sangat perlu untuk mendapatkan sentuhan CSR dari Himbara.

Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, karena kita saling membutuhkan tolong diperhatikan. Kita saling membantu untuk meningkatkan kinerja kita bersama.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Andreas silakan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan Komisi XI DPR RI.

Para direksi bank-bank BUMN dari Himbara.

Pertama, kita mengenai out look ekonomi, proyeksi ekonomi. Disini disebutkan bahwa sejalan dengan sentimen pertumbuhan ekonomi, proyeksi pertumbuhan kredit juga diprediksi mengalami pertumbuhan yang searah. Nah, saya ingin mendapatkan konfirmasi apakah di tahun 2019 ini out look perekonomian kita lebih baik dari tahun 2018. Ini jelas dulu ini supaya message ini jelas.

Terus yang kedua, dengan katakanlah nilai tukar yang mulai membaik ini, kemudian inflasi kita juga sudah membaik. Namun, isu yang masih dihadapi adalah pada saat kita melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah itu adalah masalah likuiditas sejauhmana isu ini nanti di tahun 2019. Saya lihat pertumbuhan proyeksi kredit dan dana pihak ketiga itu pertumbuhan dana pihak ketiga itu relative lebih lambat dan apa antisipasi yang dilakukan oleh bank-bank ini. Di satu sisi juga kita tahu bahwa bank-bank ini sekarang juga katakanlah itu juga bersaing dengan pihak Pemerintah di dalam kreditnya. Jadi lebih baik disampaikan langkah-langkah antisipasinya sejauhmana ini.

Terus yang ketiga adalah masalah distorsi dari tingkat bunga. Kita tahu bahwa apakah pembagian buku 4, buku 3, buku 2 dan buku 1 ini masih relevan, karena justru distorsi dari tingkat bunga itu terjadi karena hal ini dan menurut pandangan dari para

Pimpinan Himbara ini sebaiknya gimana untuk konsolidasi perbankan kita. Karena konsolidasi perbankan ini sebetulnya kalau dilakukan dengan tepat itu akan sangat membantu. Saya melihat seperti kenapa nilai Rupiah kita bagus, salah satu diantaranya ketika saya lihat adanya perimbangan *supply and demand*, karena mergernya bank SMCB dengan Bank BTN itu memberikan 3 miliar US Dolar sendiri di pasar. Itu persis kejadian pada saat Sampoerna waktu listing itu, sehingga *supply and demand*-nya jadi *supply and demand* US Dolar itu cukup terasa di pasar. Di pasar kita yang memang masih sempit.

Jadi sebetulnya salah satu instrument konsolidasi perbankan ini juga sangat penting. Saya tidak tahu di dalam *business plan*-nya tidak usah disebut namanya apakah memang ada bank-bank Himbara ini yang memang akan mengambil bank-bank kecil dalam rangka konsolidasi. Karena kalau tidak apakah memang nanti arah kondolidasi ini semua bank-bank kecil akan di lepas ke perbankan luar. Ini juga merupakan hal yang penting untuk kita lihat kedepannya.

Dan terakhir yang ingin saya dapat gambaran adalah sejauhmana dampak dari finansial teknologi di dalam internal bank sendiri. Saya lihat beberapa bank sudah seperti BNI juga sangat gencar digital, Mandiri dan seterusnya. Sejaluhmana hal ini berpengaruh kepada efisiensi di perbankan sendiri. Apakah sudah nampak di dalam penurunan misalnya OPEC-nya. Ini juga penting kita lihat.

Dan saya ingin mendapat juga *update* terakhir mengenai rencana pembentukan holding sampai sejauhmana, walaupun itu sebetulnya urusannya dari pemegang saham. Tapi apakah ada perkembangan yang bisa disampaikan kepada kita.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah tidak ada.

Saya sedikit Pak Ketua Himbara, ini masalah LDR. LDR kita inikan yang saya dengar kalau tidak salah itu sudah diatas 90%. Dan LDR itukan mencerminkan kemampuan atau kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit dibandingkan dana pihak ketiga. Ada berbagai cara untuk menurunkan LDR, yaitu menambah dana pihak ketiga atau menurunkan atau menjual aset securitisasi terhadap forto folio kredit yang ada. Tentunya untuk melakukan hal tersebut, perbankan mempunyai cara masing-masing.

Nah, saya ingin tanya apa kira-kira solusi terhadap masalah LDR, karena kalau LDR-nya sudah 100% ya perbankan stop kasih kredit. Dan kalau perbankan stop kasih kredit ya perbankan tidak mempunyai fungsi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan itu yang kita harus antisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, ini saya ingin mendapatkan gambaran dari Himbara solusi apa yang akan dicari ari Himbara untuk mengatasi masalah LDR ini, karena ini bisa hilang peran dari bank-bank Pemerintah kalau LDR ini sudah ini.

Kalau hanya mengandalkan kemampuan dalam negeri kan uangnya itu-itu saja. Uang-uang dalam negeri itu entah dimasukkan ke dalam obligasi Pemerintah atau obligasi swasta atau dana pihak ketiga, tapi jumlahnya segitu-segitu saja. yang kita harapkan inikan masuk dari luar negeri, tapi yang masuk dari luar negeri itu keputusannya dari orang luar negeri itu sendiri atau investor asing, baik melalui portofolio yang mereka mau masuk atau investment yang mau masuk. Itu tidak ada di tangan kita, kita hanya kepada kebijakan-kebijakan yang kita buat untuk mereka masukin uangnya kesini. Tapi di lain pihak perbankan ini terus kita minta untuk berperan di dalam proses pertumbuhan ekonomi ini. Nah, ini Himbara harus bisa mengantisipasi terhadap kebutuhan dana pihak ketiga, supaya kita bisa tahu ini prospek ke depannya, tinggal 7% kalau tidak salah ruang LDR kita.

Terus yang kedua, karena tren bunga kan sekarang agak naik, bunga mulai naik. Saya dengar kalau tidak salah ORI 8,15% kalau bunga naik, dana pihak ketiga naik tentunya kredit pasti akan berdampak. Tidak mungkin perbankan akan menahan tingkat suku kreditnya kalau *cost of funding*-nya dia naik terus. Tolong dijelaskan kepada kita sensitivity analisisnya tren kenaikan suku bunga terhadap kreditnya. Sektor-sektor mana yang paling sensitive terhadap kenaikan tingkat suku bunga. Mungkin kalau credit card tidak terlalu sensitive karena dia di-*charge*-nya juga besar, tapi kan ada kredit yang sangat sensitive. Berapa besar portofolio kredit yang sensitive itu di dalam dari keseluruhan portofolio kredit yang ada di Himbara.

Yang ketiga, untuk tahun 2019 sektor-sektor apa yang akan difokuskan oleh Himbara untuk menyalurkan kredit. Yang keempat atau yang terakhir adalah tentang UMKM. UMKM ini ngomongnya gampang pelaksanaannya belum gampang. Yang paling gampang melaksanakan UMKM disini saya rasa BRI, karena infrastrukturnya sudah tersiapkan. Tapi buat bank-bank kayak Mandiri, Bank BNI, inikan bank korporasi, *corporate banking* ini untuk masuk ke UMKM inikan tidak mudah. Nah, ini bagaimana persoalan ini untuk memenuhi kredit UMKM ini.

Kita sudah jam 12.10 WIB saya berikan waktu 20 menit, jadi 12.30 WIB kita selesai, sisanya dibuat tertulis supaya jadi pegangan buat kita untuk melihat prospek ekonomi ke depan.

Silakan Pak Ketua.

KETUA HIMBARA:

Terima kasih Bapak Ketua.

Kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Anggota yang terhormat, mungkin nanti ada beberapa tambahan dari teman-teman Direktur Utama Anggota Himbara.

Pertama, pertanyaan dari Bapak Ketua mengenai LDR di atas 90%, bahwa sebetulnya kita yang pertama ini adalah untuk melihat LDR tergantung daripada masing-masing bank itu fokusnya di mana. Artinya, di dalam pembiayaan itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Karena dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan daripada keuangan bahwa pembiayaan-pembiayaan itu tidak hanya dibiayai dari dana-dana DPK, pihak ketiga artinya. Banyak pembiayaan-pembiayaan

yang bisa dibiayai dengan obligasi, banyak yang dibiayai dengan surat-surat berharga dan sebagainya. Sehingga dengan ini ada beberapa alternative yang bisa kita selesaikan, yaitu adalah pertama bahwa kita tidak hanya mengusulkan kepada regulator, sekarang itu penilainya tidak hanya LDR tapi adalah LFR sehingga dana-dana ini bisa diperluas, sehingga kemampuannya ini akan menjadi lebih besar.

Yang kedua, LFR ini juga bisa di perluas lagi karena dengan adanya perkembangan-perkembangan daripada dana-dana kita, misalnya dana kita misalnya obsor, kemudian dana-dana dari korporasi dan lain sebagainya. Ini belum dimasukkan seluruhnya, ini yang mungkin bisa menambah daripada LDR kita atau istilahnya load deposit ratio kita akan menjadi lebih longgar.

Kemudian yang kedua, kami juga sependapat dengan Bapak Ketua bahwa kita perlu adanya suatu restrukturisasi aset kita dan ini sudah dilakukan Pak. Jadi dari teman-teman khususnya dari BTN itu sudah dilakukan untuk mengurangi daripada ratio daripada LDR ini menjadi lebih luas.

Kemudian yang kedua adalah mengenai bunga tren yang naik. Ini adalah memang betul, tapi kami dari Himbara tidak semata-mata untuk menaikkan bunga kredit itu proposional dengan kenaikan daripada bunga dana. Kita ketahui bahwa tahun 2018, BI sudah menaikkan daripada acuan bunganya itu 6 kali. Kalau kita proposional dengan kenaikan daripada acuan kita sudah bisa naikkan 6 kali. Namun demikian, kami dari Himbara tidak menaikkan dari secara proposional tetapi kita menjaga kualitas daripada kredit itu dan menjaga daripada stabilisasi dari pertumbuhan sektor riil tersebut.

Kemudian mengenai sektor-sektor mana yang nanti difokuskan dan UMKM, nanti mungkin masing-masing perbankan akan bisa menambahkan. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak Plate, bahwa sebetulnya kita berangkat daripada lembaga perbankan itu ada 3 hal Pak. Satu, bahwa lembaga perbankan itu adalah suatu lembaga yang sangat taat, yang sangat diatur oleh regulator dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, perbankan itu adalah lembaga kepercayaan oleh masyarakat. Yang ketiga, perbankan itu adalah lembaga intermediasi. Inilah yang mengakibatkan kalau dikatakan 74% dana pihak ketiga berasal dari DPK, artinya bahwa masyarakat itu sangat percaya kepada Himbara. Inilah yang menjadikan kepercayaan, karena dia mempercayakan uangnya ditaruh di bank kita. Dan kita yang telah mendapatkan kepercayaan kita jaga dengan baik, karena kita juga diawasi oleh regulator. Dan di dalam mendapatkan lembaga intermediasi ini, maka dana-dana di masyarakat inilah yang kita gunakan untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan sektor riil yang memberikan dampak *multiplayer effect* kepada sektor riil, baik itu tenaga kerjaan, pembangunan dan lain sebagainya.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Pimpinan, ijin langsung saja Pak.

Dengan demikian maka semakin tingginya dana pihak ketiga yang ada di perbankan nasional kita dikategorikan sebagai hutang juga adalah hal yang baik, karenanya kritik-kritik terhadap besarnya hutang BUMN nasional harus dijelaskan

dengan baik dan jangan asal ngomong seolah-olah hal itu buruk untuk perekonomian nasional.

KETUA HIMBARA:

Betul Pak.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Kita ingin menggarisbawahi itu supaya masyarakat mendengarnya dengan baik.

Terima kasih.

KETUA HIMBARA:

Jadi yang 74% bukan hutangnya perbankan tapi itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kemudian sisanya 26% bukan hutangnya, karena ada bagian equity atau laba kita sendiri mungkin kurang lebih 19% sampai 20%, sisanya itu adalah hutang yang bisa dikategorikan sebagai obligasi, itu juga kepercayaan lagi karena kita mengeluarkan *paper* yang surat yang dipercaya masyarakat. Jadi hutangnya sangat kecil sekali, coba dibandingkan bahwa kita memberikan dampak berapa, misalnya memberikan dampak adalah membangun suatu infrastruktur, membangun industry dan lain sebagainya. Ini adalah dampak daripada keikutsertaan masyarakat tadi untuk membiayakan ini.

Nah, bagaimana ketenangannya, bagaimana kepercayaan ini bisa dipercaya, kita lihat daripada tadi kinerja Himbara, NPL-nya semakin menurun, labanya semakin meningkat, kontribusi kepada pajak dan deviden semakin baik, kontribusi kepada pembiayaan-pembiayaan kepada program Pemerintah juga semakin banyak. Itulah Pak, yang dikategorikan bahwa kita adalah semakin kecil.

Kemudian masalah KUR tapi nanti akan oleh BRI. Kemudian ada mengenai bagaimana mengenai merespon daripada regulasi atau terutama mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap global. Kalau kami terus terang dari Himbara, nanti mungkin dari Mandiri karena di dalam satu transaksi adalah banyak korporasi dia telah melakukan suatu langkah-langkah yang positif mengantisipasi kegiatan-kegiatan pasar global khususnya di dalam pembiayaan impor maupun pembiayaan ekspor, maupun transaksi-transaksi yang lain.

Persiapan daripada distorsi daripada kegiatan yang sekarang ini, bahwa terus terang Pak, 4 Himbara ini bahwa infrastruktur IT-nya adalah sudah begitu maju, karena semua kegiatannya sudah dilakukan secara online, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sumber daya manusia kita hampir rata-rata 4 bank antara 60% sampai 70% itu adalah tenaga istilahnya umur yang produktif atau bisa dikategorikan sebagai generasi milenial. Ini yang menguntungkan untuk bisa menyesuaikan daripada perubahan-perubahan yang terjadi secara global.

Kemudian performance yang disampaikan oleh pertanyaan dari Bapak Refrizal, nanti disampaikan oleh BRI. Dan kemudian tadi yang dikatakan adalah mengenai kredit perumahan yang ada di Serpong, saya kira nanti akan kita teliti lagi Pak. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa uang muka yang dibayar masyarakat kepada developer tidak menjadi suatu kewajiban bahwa itu akan mendapatkan rumah. Itu tergantung daripada developer tersebut, apakah karena pembayarannya itu langsung kepada developer, kecuali pembayarannya melalui perbankan dan developer tersebut sudah mendapatkan pinjaman daripada bank yang bersangkutan.

Kenapa developer tidak bisa mendapatkan pinjaman walaupun dia sudah dapat uang muka dari masyarakat. Ada beberapa hal, analisa-analisa yang harus kita berikan tidak hanya semata-mata mendapatkan uang muka atau mendapatkan calon pembeli karena banyak faktor-faktor teknis mengenai perijinan, pengalaman dan lain-lainnya ini juga menjadi perhatian perbankan di dalam pembiayaan kredit tersebut.

Kemudian yang berikutnya adalah Pemerintah mengenai pembiayaan yang murah, kemudian peningkatan CSR. Terus terang bahwa kami telah banyak memberikan CSR-CSR dan saya kira ini juga menjadikan kita selalu mendengar dan menjadikan pertimbangan kalau ada satu kelompok-kelompok masyarakat yang perlu bantuan, karena kami Himbara adalah bagian daripada Pemerintah sehingga tidak semata-mata mencari provit akan tetapi kami juga melaksanakan sebagai *agent of development*. Sebagai contoh Pak, Himbara ini kita sebagai menggerakkan, kita membangun suatu Balades yang ada di Borobudur. Itu adalah untuk meningkatkan daripada wisata yang ada di Borobudur tersebut, sehingga balai-balai tersebut dipakai untuk meningkatkan ekonomi yang ada di lingkungan Borobudur tersebut. Di samping itu, kita buat satu penginapan yang murah sekali sehingga satu pihak bisa mendatangkan turis yang ke Borobudur karena nginepnya biaya murah, juga bisa meningkatkan *skill* daripada penduduk masyarakat di sekitarnya itu bisa membuat satu kegiatan-kegiatan, misalnya membuat souvenir dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Himbara salah satu bagian daripada kita melakukan CSR tersebut.

Kemudian adalah mengenai pertanyaan yang berikutnya adalah tadi CSR. Kemudian ada dari Bapak Andreas, bahwa pertumbuhan DPK memang kita memang lebih rendah, jadi memang kita katakan kalau kita lihat prospek ke depan kita juga antara peningkatan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan daripada DPK itu lebih rendah daripada pertumbuhan DPK. Dan ini menjadikan sebagai tantangan kita memang di dalam situasi tadi pengaruh global maupun pengaruh makro kita, kita memang agak tahun ini adalah sangat likuiditasnya itu sangat ketat. Tapi tidak menurunkan daripada ekspansi kita untuk menaikkan daripada ekspansi kredit kita.

Pertanyaannya bagaimana dana ini berasal? Inilah yang kita pikirkan masing-masing bank punya strategis, bahwa dana yang kita gunakan untuk kredit tidak semata-mata berasal dari DPK, tapi bisa dana-dana yang dari lain-lainnya yang dimana semua itu bisa memberikan keuntungan masing-masing perbankan itu sendiri.

Kemudian adalah sektor-sektor mana yang tadi Bapak ini, kemudian bagaimana distorsinya terhadap suku bunga ini. Saya kira memang kita perlu diatur lagi Pak, mengenai buku 1, 2, 3 dan 4 bagaimana dia mengatur daripada suku bunga

dana, karena kalau ini tidak diatur maka apalagi ini dengan pengetatan pada likuiditas kita, maka dana-dana tersebut akan berkembang meningkat, sehingga ini akan tidak bisa memberikan suasana kondusif di dalam kita menciptakan suku bunga yang stabil.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Izin Pimpinan.

Justru itu saya kira usulannya bagaimana, karena kalau diatur itukan seakan-akan mengganggu mekanisme pasar. Menurut kira-kira pandangan para bankir itu kira-kira *performance* apa yang bisa dilakukan. Kalau begitu dilakukan oleh regular dan segala macam, dibaca oleh pasar akan jadi lain. Ini yang sebetulnya, akan tetapi saya setuju bahwa harus ada suatu *frame work of arrangement* bagaimana atau memang buku 1, 2, 3, 4 nya kategorisasinya yang dilihat kembali. Karena ini istilahnya besarnya disitu ya dan ini begitu ada likuiditas yang mengetat pasti yang kena 2, 3 langsung efeknya juga akhirnya yang besar juga harus mengikuti. Ini sebetulnya yang perlu kita pikirkan bersama.

Terima kasih.

KETUA HIMBARA:

Saya kira saya sependapat Pak, tadi kita katakan bahwa kita perlu aturan lagi dimana pengaturan-pengaturan itu dibuat secara fleksibel. Jadi semata-mata pengaturan itu mengurangi daripada ruang pasar, bahwa pasar itu tidak ada pasar yang sebebaskan-bebasnya, bahwa pengaturan pasar itu juga perlu apalagi untuk kepentingan nasional. Jadi saya kira, Cuma kita atur bagaimana pengaturan-pengaturan ini diatur secara fleksible dan tidak mempengaruhi secara kaku ketat. Itu yang kita harapkan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Mungkin penegasan mengenai pertumbuhan ekonomi tahun ini dibandingkan tahun 2018.

KETUA HIMBARA:

Tadi sebetulnya dari awal kami sudah menyampaikan penegasan bahwa kami pada saat menyusun daripada RBB kami, kami mengikuti daripada penegasan daripada asumsi-asumsi yang digunakan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia yang kami modifikasi kira-kira bahwa asumsi yang kami gunakan adalah contohnya.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Mohon maaf ini, kami paham asumsinya tapi sekarang *feleing*-nya, itukan asumsi berdasarkan angka. Tapi *feeling*-nya itu apakah pertumbuhan ekonomi di

tahun 2019 ini dibandingkan tahun 2018, atau katakanlah sesuai dengan kalkulasi.

KETUA HIMBARA:

Pada umumnya secara umum Pak, bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah sudah sesuai. Dan saya kira ini menjadi lebih baik dibandingkan di tahun 2018, karena ada beberapa pertimbangan bahwa struktur daripada ekonomi nasional itu semakin baik terjaga. Kemudian walaupun....

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Ekonomi kita di tahun 2019 diramalkan lebih baik bukan lebih buruk.

KETUA HIMBARA:

Lebih baik.

Pak, saya kira itu sementara mungkin dari teman-teman dari Direktur Utama bisa menambahkan.

Silakan Pak, Pak Baikuning mungkin.

DIREKTUR HIMBARA (BAIKUNING):

Saya sedikit Pak, mungkin yang terkait dengan sistem pembayaran QR Code tadi Pak. Mungkin perlu kami sampaikan Pak, bahwa sebenarnya kami Himbara ini masing-masing sudah memiliki pay system yang berbasis QR Code. Kami sudah mereka-*launching*, kemudian sudah kami pasarkan. Kemudian memang ada keinginan dari kami semua Himbara, bahwasanya sepertinya kita memang harus punya satu sistem pembayaran satu tapi berlaku secara nasional, seperti halnya yang ada di Cina, kemudian ada we chat.

Nah, kemudian kami sepakat setelah kami me-*launching* sendiri-sendiri kami sepakat untuk membuat satu sistem pembayaran, yaitu QR Code. Nah, ini sekarang dalam proses untuk menuju ke satu tadi seperti halnya yang dilakukan yaitu *payment* melalui ATM. Dulu ATM masing-masing, nah sekarang adanya ATM Bara yang kita sebut ATM Link itu yang menjadi strategi kami kedepannya untuk *payment system*.

Nah, memang kaitannya dengan we chat tadi Pak, kami dari BNI sebenarnya kami pada waktu beberapa bulan yang lalu kami melakukan *pilot*. Kami coba artinya *we chat* sama dengan kami, jadi ijin yang kami peroleh pada waktu sebagai *pilot*. Namun, dalam perkembangannya setelah kami kaji memang kami perlu sedikit memperbaiki dari segi teknisnya. Tapi dengan akan bergabungnya nanti sistem ini, nanti mungkin langsung saja Pak. Artinya, dengan sistem Himbara yang satu ini mungkin kami akan menjajaki juga kerja sama dengan *payment system* dari luar, karena memang kalau itu didiamkan saja dan regulator juga sulit untuk mengendalikannya seperti kerugian ada di pihak kita. Karena *merchant*-nya itu *merchant* kita kemudian akhirnya pembayarannya dilakukan melalui sistem yang ada

di Cina. Jadi kita tidak mendapatkan benefit apa-apa.

Nah, kalau itu bisa kita tangkap paling tidak dari *merchant* kita bisa mendapat, kemudian dari *settlement* tadi kita mendapatkan. Mudah-mudahan kearah sana Pak, kita.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Ketua, ini untuk cross top up electronic fund sudah ya.

KETUA HIMBARA:

Sudah Pak, jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Baikuning jadi kita akan menuju kepada *e-wallet* dan lain sebagainya. Akan tetapi sebelum ke *e-wallet* sebetulnya kita sudah menjalankan, contohnya kita sudah bisa membuat top up cross dengan 4 bank ini misalnya untuk pembayaran e-toll. Kemudian kita ATM link yang dimana kartu-kartu kita ini bisa melakukan setoran atau menarik melalui ATM link ini. Kartu-kartu ini nanti bisa di-cross apalagi dengan menggunakan nanti kalau kita sudah ada *e-wallet*. Jadi ini sudah kita antisipasi.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Kadang-kadang *top up*-nya harus pakai *mobile banking*, apakah sudah bisa itu *cross* juga kalau *mobile banking*.

DIREKTUR HIMBARA (SUBRA):

Belum, yang ATM Pak.
Pak Subra mungkin.

DIREKTUR HIMBARA (SUBRA):

Terima kasih.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.

Yang pertama, kami akan menyampaikan yang ditanyakan oleh Bapak Johnny Plate. Yang terkait dengan KUR Pak, tapi mungkin kami jelaskan yang terkait dengan BRI saja dulu. Jadi sampai dengan mulai KUR 2015 yang lalu sampai dengan saat ini sudah 12,6 juta yang kita berikan di BRI Pak, dengan nilai nominal kurang lebih 235,4 triliun jadi cukup besar.

Yang sangat membanggakan adalah bahwa sebanyak 2,15 juta itu sudah naik kelas. Jadi sudah komersial sekarang, sudah bukan golongan di subsidi lagi. Dan ini tentu akan terus tumbuh dan kami punya sekarang di BRI kita bentuk BRI micro finance center yang tujuannya adalah karena kalau secara institusi kami sendiri

mungkin agak kuwalahan. Oleh karena itu, kita bentuk BRI micro finance center yang tujuannya adalah karena kita akan terus dampingi KUR baru yang mungkin mereka masih belum terlalu terbiasa dengan usahanya, kreditnya dan sebagainya. Dan pendampingan ini bukan hanya masalah permodalan akan tetapi juga yang terkait dengan pemasaran, kemudian produksi dan sebagainya. Ini yang harapan kami nanti akan terus mempercepat pertumbuhan yang naik kelas. Sehingga kalau yang naik kelas tambah banyak tentu yang akan menerima KUR juga akan makin banyak untuk menggantikan yang naik kelas.

Kemudian apa yang disampaikan Bapak Refrizal, kami sudah terus menerus Pak, sebetulnya mengingatkan kepada adik-adik di bawah untuk jangan minta jaminan. Tapi memang ini secara mungkin beban mereka sangat, tanggungjawabnya terlalu inilah karena apapun kalau nunggak juga dikejar-kejar. Kemudian juga dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya. Tapi secara institusi kami terus menerus tidak pernah putus untuk jangan minta jaminan.

Terima kasih Bapak Refrizal, kebetulan di Sumbar juga dikawal oleh Bapak Andrino Pak. Jadi untuk KUR di Sumbar itu kami dikawal oleh Bapak Andrino yang bersangkutan adalah Komisaris Utama di BRI.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Sekalian Pimpinan.

Itu tadi disampaikan saya belum dengar sampai sekarang ini spasial KUR per provinsi. Seperti di NTT sana ini KUR belum berhasil membuat mereka naik kelas, bahkan masuk sekolah saja belum Pak, di NTT sana itu. Ini serius ini, kalau pun sudah ada yang masuk sekolah disana Pak, itu pedagang-pedagang perantara di sektor distribusi, belum di sektor hulu rakyat-rakyatnya. Apalagi NTT berkembang ke industry pariwisata yang menjadi program nasional.

Nah, ini tolong juga BRI tidak perlu naik kelas dulu tapi dia masuk sekolah. Nah, ini belum masuk sekolah sama sekali.

DIREKTUR HIMBARA (SUBRA):

Pak Johnny, kita membuat tadi BRI Finance Center itu tujuannya adalah untuk itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan secara institusional di organisasi di internal kami kuwalahan Pak, dengan jutaan orang. Dan ini nanti BRI micro finance center ini ada di setiap kantor wilayah dan bahkan kita usahakan untuk di setiap provinsi itu ada, karena tidak semua kantor wilayah ada di provinsi.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Kebetulan NTT salah satu yang masih sangat tertinggal ini Pak, tolong diperhatikan betul-betul.

DIREKTUR HIMBARA (SUBRA):

Siap Pak, kebetulan ada Pak Sonny Kerap juga disana.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ijin Pimpinan, Pimpinan masih ngantuk.

Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya bergabungnya agak terlambat karena memang sebenarnya saya tidak boleh hadir dalam rapat ini karena saya sedang kunjungan Dapil tetapi saya menyempatkan hadir untuk menyampaikan sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang KUR tadi. Kebetulan Bapak Subra menyampaikan tentang KUR, maka saya pikir mungkin cara penilaian kawan-kawan di cabang terhadap keberhasilan KUR itu masih bukan kepada penyerapan atau maksimal penyalurannya Pak, tapi lebih kepada efektifitas daripada penyaluran itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Johnny tadi. Apakah debitur KUR itu setelah menerima KUR itu dia mampu untuk mengembangkan usahanya atau tidak.

Jadi meskipun KUR sudah terserap hampir 100% tapi kalau kondisi masyarakat di sekitar atau khususnya debitur penerima KUR itu masih kesulitan di dalam pengelolaan usahanya mungkin itu menjadi penilaian khusus. Jadi tadi ada micro finance center dari BRI mungkin fokus untuk indikator keberhasilannya kawan-kawan di cabang itu adalah kalau debitur KUR itu sendiri mampu untuk istilahnya naik kelas, menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan tidak lagi menjadi nasabah KUR nantinya, dia bisa mandiri seperti itu.

Dan kemudian kalau misalnya orientasi Pemerintah saat ini selain tourism juga ekspor. Nah, mungkin saya juga perlu kalau tidak bisa lisan saat ini Himbara mungkin juga bisa tertulis, yaitu apa kira-kira strategi yang dilakukan kalau tujuan ekspor kita negara itu juga saat ini mengalami pelambatan ekonomi.

Nah, itu saja Pimpinan dari saya.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Ir. H. SOEPRİYATNO):

Silakan kalau masih ada lagi pertanyaan.

Saya masih kasih kesempatan.

Silakan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Pak, tadi dikatakan forecasting kita untuk pertumbuhan ekonomi kita diharapkan di tahun 2019 akan jauh lebih baik daripada 2018. Barangkali ini ditandai dengan proyeksi NPL Badan Usaha Milik Negara ini di tahun 2019 mudah-mudahan akan jauh lebih baik dari tahun 2018, kira-kira begitu Pak. Pertanyaan kami, apakah ini berlaku permanen atau kurun waktu 12 bulan (1 tahun) atau ini sifatnya temporer saja. Coba direnungkan dulu ini, apakah ini sifatnya temporer 6 bulan atau memang permanen

dalam waktu 12 bulan. Bagaimana ini Himbara melakukan langkah-langkah ini Pak, menyelesaikan.

KETUA HIMBARA:

Pak ijin Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI.

Mungkin kami menambahkan Pak, sebelum NPL tadi ada dua yang tadi saya ingin tambahkan yang belum di-cover. Yang pertama, mengenai antisipasi terhadap situasi global, jadi kami di Himbara selalu berkoordinasi dengan BI untuk memperluas dan menambah instrument-instrumen untuk mengamankan valas. Sebagai contoh di tahun lalu kita melundurkan DNDF bersama-sama. Kemudian saat ini juga dalam proses untuk memperbaiki dan mereka-*launching* untuk DHE. Bagaimana DHE bisa diberikan intensif khusus sehingga bisa mengendap dalam jangka yang panjang diperbankan nasional ini lagi diskusi dengan BI dan Kementerian Keuangan untuk bagaimana *account*-nya dan memberikan fasilitas pajak.

Kemudian kami juga melakukan pendalaman yang paling penting juga di soft market untuk supaya soft ini jangka pendek kalau bisa jangka menengah, ketika 5 tahun mulai ada sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan dana itu bisa dipenuhi dengan Dolar juga tapi ke Rupiah. Ini kami terus berkordinasi dengan BI untuk memperdalam pasar keuangan dan juga memperkuat instrumen-instrumen pendanaan dan juga *hedging*. Jadi *hedging*-nya juga terus kita perkuat sehingga kalau kita lihat di tahun 2018 kemarin perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai Dolar exposur hampir semuanya sudah ada proporsi *hedging* minimal 20%. Nah, ini membantu juga menunjukkan bahwa korporasi Indonesia tidak ada yang terkena valas yang terlalu besar di tahun 2018 kemarin. Jadi ini secara koordinatif kita terus berkoordinasi dengan BI dan harapannya dari tahun ke tahun nanti kelonjakan valas ini tidak terlalu mengganggu di perekonomian nasional lagi Pak.

Satu pertanyaan tadi mengenai holding Pak, tadi pertanyaan mengenai holding. Jadi kalau holding perbankan ini memang tetap akan kami dorong bersama-sama dengan Kementerian BUMN. Sekarang memang posisi terakhir ada diskusi dengan KKSK terkait dengan dampak holding terhadap Dari Bank Himbara. Jadi ini sedang kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan dan dengan KKSK bahwa apabila terjadi holding ini nanti bagaimana dampaknya terhadap Nah, ini nanti kami harapkan akan ada kajian yang kita akan berikan. Tapi dari sisi operasional kami juga membentuk perusahaan Calin Pak, yang saat ini ada di bawah Telkom akan segera di koordinasikan. Jadi pertanyaan mengenai fintech dan payment system Himbara kita akan integrasikan di bawah dana holding, sebagai pendahuluan untuk holding. Nanti inisiatif kita untuk mengintegrasikan sistem pembayaran, baik QR maupun ATM semuanya ada di dalam satu perusahaan di bawah holding. Diharapkan nanti dampaknya ke efisiensi dari kita berempat semakin lama semakin terasa karena pengelolaan infrastrukturnya ada di satu center dan scalable di jalin.

Kemudian tadi pertanyaan mengenai NPL, kebetulan kami NPL-nya paling tinggi Pak, jadi sekalian bisa jawab Pak. Kita NPL *alhamdulillah* dalam 3 tahun terakhir menurunnya cukup tajam Pak. Jadi kita lihat tren perbaikan NPL 2-3 tahun terakhir

sangat baik. Jadi kalau kita lihat tadi secara rata-rata NPL di Himbara di tahun ini diharapkan bisa mendekati 2% atau mungkin sekitar 2.4% atau 2.5%. Nah, ini trennya saya rasa jangka panjang Pak, memang di tahun 2013-2014 kemarin cukup besar dampak dari perlambatan komoditas khususnya batu bara, tapi rasanya dampaknya mulai termitigasi. Ke depan memang kita yang harus kita waspadai tadi terkait dengan kebijakan Pemerintah, memang terkait komoditas Pak. Karena Komoditas ini paling berdampak kepada NPL, jadi kami coba memberikan masukan kepada Pemerintah terkait dengan harga sawit dan batu bara, khususnya sawit. Jadi sawit ini memang komoditas yang sangat ber-impact kepada Jadi kami mendukung program B20 agar bisa terus berjalan walaupun harga minyaknya sudah sedikit menurun, tapi jangan sampai ini berhenti program ini, karena ini sangat penting untuk meningkatkan demand dalam negeri kepada produksi sawit yang sebenarnya meningkat terus. Nah, ini tentunya kalau harga sawit sudah mulai naik lagi dan batu bara stabil moga-moga arus komoditas ini tidak terjadi lagi dan harapannya NPL kita bisa terus melandai terus di masa depan.

Terima kasih Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Ir. H. SOEPRİYATNO):

Silakan masih ada lagi?

KETUA HIMBARA:

Ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Junaidi Pak.

Begini Pak, apabila diperkenankan kami bisa mendapatkan nama calon debitur yang mengajukan yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan keputusan Pak. Nanti kami akan teliti permasalahannya apa, segera kami laporkan itu, itu Pak.

Terima kasih Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Ir. H. SOEPRİYATNO):

Silakan Pak, masih ada lagi yang ingin disampaikan?

Pertanyaan cukup?

Cukup.

Terima kasih, tentunya Pimpinan Komisi XI DPR RI tetap berharap bahwa semua yang disini tidak ingin perekonomian kita lebih buruk daripada tahun yang lain, Artinya, kita ingin tahun 2019 ini perekonomian kita menjadi lebih baik. Kemudian kita juga ingin mengingatkan bahwa tantangan tahun 2019 ini masih tinggi, instabilitas nilai valas misalnya dulu disini kita putuskan itu 14.500 tapi Menteri bersama Banggar inginnya 15.000. Kemarin *alhamdulillah* sekarang kita sudah mulai menurun. Jadi apa yang diputuskan oleh Komisi XI DPR RI itu lebih prudent.

Kemudian yang lain adalah instabilitas nilai komoditas di luar negeri, di mana kita masih tergantung kepada impor. Ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian hal-hal yang lain tetap kita berharap bahwa bank-bank milik negara di bawah Himbara ini

tetap memiliki daya tahan yang tinggi. CAR-nya di atas 22%, kemudian NPL tentunya di bawah 3%, itu tetap yang harus kita jaga bersama.

Jadi saya kira itu saja titip pesan kami, *insya Allah* mari kita berjuang bersama sehingga tahun 2019 perekonomian kita lebih baik, rakyat lebih baik dan lebih sejahtera. Saya kira itu keinginan kita bersama.

Saya kira itu ya yang ingin kita sampaikan, nanti kita mohon nanti jawaban tertulis dari Himbara tentang apa tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang bertanya di Komisi XI DPR RI. Dan saya kira ini tidak perlu kita mengambil keputusan akan tetapi kita sudah menerima masukan yang sangat berarti ya dari bank-bank Himbara tentang perekonomian nasional di tahun 2019.

Cukup ya?

Kalau tidak ada hal yang penting lagi yang kita bicarakan, selanjutnya kami persilakan sebelum saya tutup saya mohon dari Ketua Himbara untuk menyampaikan kata akhir.

Kami persilakan.

KETUA HIMBARA:

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat.

Kami dari Himbara tetap akan melakukan suatu usaha-usaha yang optimal untuk perbaikan terhadap bangsa dan negara ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Ir. H. SOEPRİYATNO):

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat saya tutup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.37 WIB)

Jakarta, 15 Januari 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soediarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**